

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, FISKAL STRESS DAN
KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Empiris Pada Kota Dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun
2017-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

IRA PUSPITASARI

NPM. 21601082012



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MALANG**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal, fiskal stres, kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota dan kabupaten di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kota / Kabupaten di Jawa Timur. Selanjutnya variabel penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, sehingga dapat diketahui apakah variabel penelitian berpengaruh langsung atau tidak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas (desentralisasi fiskal, fiskal stres dan kinerja keuangan) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi). Dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pada masa desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan meningkatkan otonomi daerah, yaitu kebutuhan fiskal dan kemampuan fiskal (barang dan jasa) agar pemerintah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan ekonominya.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Stres Fiskal, Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of fiscal decentralization, fiscal stress, financial performance on economic growth in cities and districts in East Java. This type of research is quantitative. The data used are secondary data obtained indirectly through intermediaries, such as other people or documents. Secondary data in this study are the financial statements of the City / Regency governments in East Java. Next, the research variables were analyzed using multiple linear regression analysis, so that it could be seen whether the research variables had a direct effect or not. The results of the analysis show that the independent variables (fiscal decentralization, fiscal stress and financial performance) have a significant effect on the dependent variable (economic growth). In increasing economic independence during the period of fiscal decentralization, local governments given the authority to regulate and increase regional autonomy, namely fiscal needs and fiscal capacity (goods and services) so that the government is able to optimize its sources of economic revenue.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Fiscal stress, Financial Performance, Economic Growth.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Hidayat (2007:281) Masalah pertumbuhan ekonomi sudah menarik minat para ahli ekonomi sejak masa Adam Smith sampai dengan banyak para ahli ekonomi dewasa ini yang pada waktu-waktu yang lalu perhatian para ahli-ahli ekonomi itu terutama hanya tertuju pada masalah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, dewasa ini perhatian sebagian dari mereka telah pula diarahkan pada masalah pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.

Berbicara tentang makro ekonomi, maka tidak terlepas dari peran serta Pemerintahan suatu Negara sebagai pengatur Kebijakan dan pembuat Undang – Undang. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang No. 22 dan Undang – Undang No. 25 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya pada tahun 2004, Pemerintah kembali menerbitkan UU No, 32 dan 34 Tahun 2004 sebagai pengganti kedua Undang – undang tersebut. Hakekat kedua Undang – undang

tersebut itu sendiri adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih 2003), dan desentralisasi fiskal merupakan implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah yaitu menyangkut kebutuhan dana yang cukup besar, sehingga perlu diatur dan diupayakan perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Peran pemerintah daerah terhadap perekonomiannya berkaitan dengan desentralisasi yang digunakan di Indonesia melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Seperti dikatakan dikutip Hidayat (2007:238) “Dalam dimensi ekonomi, acapkali dikemukakan bahwa urgensi dari diterapkannya desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services* (barang dan jasa untuk umum), serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah”.

Kemampuan keuangan suatu daerah merupakan salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi. Pemerintah Daerah diberikan kemampuan dan kewenangan untuk menggali setiap potensi daerahnya agar daerah memiliki sumber-sumber penerimaan daerahnya untuk membiayai pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya. Daerah yang mempunyai pendapatan yang cukup besar dan independen akan mempunyai posisi yang lebih baik dari pada yang tergantung dari dana Pemerintah Pusat. Sebab dengan pembiayaan yang lebih banyak diperoleh dari usaha sendiri, maka pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengelola keuangannya.

Oleh karena itu, daerah yang lebih mandiri merupakan dambaan dari setiap pemerintah daerah. Untuk dapat melihat apakah Kabupaten/Kota bisa melaksanakan otonomi dengan baik dapat dilihat dari besarnya derajat desentralisasi fiskal (DDF), yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerahnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Adanya tekanan fiskal sejak diberlakukannya otonomi daerah karena dengan adanya kewenangan daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan daerah harus dituntut untuk lebih mandiri sehingga Pemerintah di Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Timur lebih intensif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah.

Fiscal stress atau tekanan anggaran terdiri dari dua kata yaitu *fiscal* dan *stress* dalam Inggris. *Fiscal* atau fiskal mempunyai arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu anggaran dan *stress* atau tekanan yang berarti keadaan yang tidak menyenangkan. Beberapa pendapat dari penelitian terdahulu menjelaskan pengertian apa itu *fiscal stress*, diantaranya adalah menurut Muryawan dan Sukarsa (2014), menyatakan *fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya. Hevesi (2006), menyimpulkan “*fiscal stress is a judgment about financial condition-it generally means that*

a community is having a difficult time financing its operations, and is experiencing growing budgetary problems”; dalam bahasa Indonesia yaitu, tekanan fiskal adalah penilaian tentang kondisi keuangan yang pada umumnya masyarakat mengalami keterbatasan pembiayaan operasi, dan mengalami masalah pertumbuhan anggaran.

Menurut Dinapoli (2016), *fiscal stress* adalah penilaian tentang kondisi keuangan suatu entitas yang harus mempertimbangkan situasi yang unik. Secara umum dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dalam jangka waktu saat ini untuk memenuhi pengeluarannya (anggaran solvabilitas). Pengertian-pengertian tersebut juga diperkuat oleh hasil penelitian beberapa peneliti asing yang membahas tentang *fiscal stress*, seperti Grand Cayman (terletak di Inggris), Afrika Selatan, U.S, dan negara lainnya.

Menurut Brodjonegoro (2003) pelaksanaan desentralisasi sebagai pendekatan *Bing Bang* karena jangka waktu persiapan yang terlalu pendek untuk ukuran negara yang begitu besar dengan kondisi geografis yang cukup menyulitkan. Terlebih ditengah-tengah upaya bangsa melepaskan diri dari krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan dari pertengahan tahun 1997.

Menurut Hasugian (2006), kebijakan desentralisasi fiskal yang dititik beratkan pada kabupaten/kota, akan memberi keleluasaan daerah untuk melihat dan menentukan skala prioritas pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah dan disertai dengan keleluasaan pemerintahan daerah untuk membelanjakan dana alokasi yang

diterima. Kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Daerah mengalami peningkatan tekanan fiskal (*fiscal stress*) yang lebih tinggi dibanding era sebelum otonomi. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Beberapa penelitian telah dilakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Sukarsa (2014) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, dan kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Sartina (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal, *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Anisya dkk (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan yang berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal. Selain itu, hanya variabel pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel alokasi belanja modal hanya memediasi secara parsial pengaruh variabel derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian ini **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiskal Stress Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal, *fiskal stress* dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh fiskal stress terhadap pertumbuhan ekonomi?
4. Bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, fiskal stress dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh fiskal stress terhadap pertumbuhan ekonomi
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori akuntansi, khususnya akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen dan ilmu pengetahuan teoritis terkait dengan desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi keuangan daerah, khususnya tentang pengaruh desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Pemerintah Kota/kabupaten Jawa Timur

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam menyikapi fenomena yang berkembang sehubungan dengan desentralisasi fiskal, *fiscal stress*, kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi dalam mengembangkan dan memperluas penelitian berikutnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Analisis menggunakan regresi linear berganda. Maka hasil penelitian menunjukkan :

1. Berdasarkan perhitungan uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang diambil dari situs direktorat jendral perimbangan keuangan daerah, tidak berdasarkan observasi sehingga kurang dapat digali lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan daerah.
2. Terdapat banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan nilai *R Square* yang kecil sebesar

50%, dan dalam penelitian ini hanya menggunakan Desentralisasi Fiskal, *Fiscal Stress* dan Kinerja Keuangan sebagai variabel independen.

3. Sampel dalam penelitian ini terbatas pada kota dan kabupaten di Jawa Timur sehingga jumlahnya relatif kecil dan mengurangi daya generalisasi penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah data berupa data sekunder dan menggunakan metode observasi sehingga penelitian dapat digali lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi, misalnya Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan tidak terbatas hanya pada kota dan kabupaten Jawa Timur saja, seperti menambah Kota dan Kabupaten Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kota atau Kabupaten yang berada di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Anisya, Rahayu Sri & Junaidi. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. [VOL 5 NO 1 \(2020\): JURNAL AKUNTANSI & KEUANGAN UNJA /](#)
- Basri, F dan Munandar, H. 2010. “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Brodjonegoro, Bambang. 2003. Dua Setengah Tahun Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Mendorong Investasi. Kongres ISEI. Malang.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon. Local State Elite`s perspective on and the puzzle of contemporary Indonesian regional autonomy policy*. Edisi dua bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Ardi, 2006. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisisjalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). Jurnal Studi Ekonomi, Vol III No. 1, Juni.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFEE.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Priyatno, D. 2015. Cara kilat belajar analisis data dengan SPSS 2.0. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Reschovsky, Andrew. 2003. The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments. Fiscal Journal. Vol 4. No.3.

- Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunyoto, Suyanto 2011. Analisis regresi untuk uji hipotesis, Yogyakarta. Caps
- Sukarsa, Made. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2: 229-252.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusrin. 2010. Ekonometrika. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Shamsub, H., Joseph B.A. 2014. "State and Local Fiscal Structure and Fiscal Stress". Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; Spring 2004. International College of the Cayman Islands.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Anisya, Rahayu Sri & Junaidi. 2020. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. [VOL 5 NO 1 \(2020\): JURNAL AKUNTANSI & KEUANGAN UNJA /](#)
- Basri, F dan Munandar, H. 2010. “Dasar – Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan & Aplikasi Metode Kuantitatif”, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Brodjonegoro, Bambang. 2003. Dua Setengah Tahun Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Mendorong Investasi. Kongres ISEI. Malang.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon. Local State Elite`s perspective on and the puzzle of contemporary Indonesian regional autonomy policy*. Edisi dua bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Ardi, 2006. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisisjalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). Jurnal Studi Ekonomi, Vol III No. 1, Juni.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2016. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Priyatno, D. 2015. Cara kilat belajar analisis data dengan SPSS 2.0. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Reschovsky, Andrew. 2003. The Implication of State Fiscal Stress for Local Governments. Fiscal Journal. Vol 4. No.3.

- Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sunyoto, Suyanto 2011. Analisis regresi untuk uji hipotesis, Yogyakarta. Caps
- Sukarsa, Made. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.2: 229-252.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. alfabet.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusrin. 2010. Ekonometrika. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Shamsub, H., Joseph B.A. 2014. "State and Local Fiscal Structure and Fiscal Stress". Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; Spring 2004. International College of the Cayman Islands.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.